

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Islam Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Putri Hafidzah¹, Risma Euis Patonah², M. Zaki Rizanata³

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur, Indonesia; putrihafidzah49@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur, Indonesia; rissmaeuisfathonah@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Cianjur, Indonesia; Zakirizanata85@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 11, 2024
Accepted : June 13, 2024

Revised : May 15, 2024
Available online : July 07, 2025

How to Cite: Putri Hafidzah, Risma Euis Patonah, & M. Zaki Rizanata. (2025). Islam in Indonesia During the Dutch Colonial Rule. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(2), 87–103. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i2.7>

Islam in Indonesia During the Dutch Colonial Rule

Abstract. Islam in Indonesia during the Dutch colonial period. The research utilizes a literature review method, analyzing various historical sources and relevant literature to uncover the dynamics of Islam in the colonial context. was not just a religion, but also a political and ideological force that influenced Indonesian history. Since its initial arrival, Islam has been a significant political force in Indonesia. Islamic sultanates played a crucial role in expanding the influence of the religion, confronting Western colonialism, and establishing a strong political identity in the archipelago. Islam in confronting colonialism. Resistance to colonialism and the VOC's trade monopoly demonstrates the central role of Islam in the history of Indonesia's struggle. The Aceh War (1873 - 1912), led by scholars and sultans, is a prime example of how pesantren and scholars played a role in resisting colonialism. The article further highlights the vital role of pesantren as centers of religious and cultural instruction, as well as places for nurturing national leaders and anti-colonial movements. Pesantren taught students to fight injustice and oppression, fostering a sense of nationalism among Muslims. Through pesantren, Islam

not only taught spiritual values but also moral and social values that encouraged the struggle for independence. In the early 20th century, scholars began to adopt a new, more organized approach through the formation of organizations such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. These organizations became platforms for Indonesian Muslims to engage in structured action to fight for independence and national progress. Overall, the article demonstrates that Islam has been an influential force in Indonesian history, both in confronting colonialism and in building a national identity. The struggle of Muslims, manifested in various forms of resistance and movements, has made a significant contribution to shaping the history and future of the Indonesian nation. This article underscores that Islam plays a role not only in spiritual life but also in social, economic, and political life, becoming a force driving change and progress in Indonesia.

Keywords: Islam in Indonesia, Dutch colonialism, Government, Politics, Struggle for Independence

Abstrak. Peran Islam di Indonesia selama masa pemerintahan kolonial Belanda. Penelitian ini menggunakan metode literatur, menganalisis berbagai sumber sejarah dan literatur terkait untuk mengungkap dinamika Islam dalam konteks kolonial. Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga kekuatan politik dan ideologis yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Sejak awal kedatangannya, Islam telah menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Kesultanan Islam memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh agama, menghadapi penjajahan Barat, dan menciptakan identitas politik yang kokoh di Nusantara. Peran Islam dalam menghadapi kolonialisme. Perlawanan terhadap kolonialisme dan monopoli perdagangan VOC menunjukkan peran sentral Islam dalam sejarah perjuangan Indonesia. Perang Aceh (1873-1912), yang dipimpin oleh ulama dan sultan, merupakan contoh nyata bagaimana pesantren dan ulama berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Peran penting pesantren sebagai pusat pengajaran agama dan budaya, serta tempat melahirkan pemimpin bangsa dan pusat pergerakan anti-kolonial. Pesantren mengajarkan para santri untuk melawan ketidakadilan dan penindasan, serta menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan umat Islam. Pada awal abad ke-20, ulama mulai mengadopsi pendekatan baru yang lebih terorganisir melalui pembentukan berbagai organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Organisasi-organisasi ini menjadi wadah bagi umat Islam Indonesia untuk bergerak secara terstruktur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Islam telah menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia, baik dalam menghadapi kolonialisme maupun dalam membangun identitas nasional. Perjuangan umat Islam, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perlawanan dan gerakan, telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk sejarah dan masa depan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Islam di Indonesia, Kolonial Belanda, Pemerintahan, Politik, Perjuangan Kemerdekaan

PENDAHULUAN

Islam di Indonesia, sejak kedatangannya sudah memainkan peranan politik dan ideologis yang sangat penting dan menentukan bagi jalannya sejarah Indonesia. Pentingnya arti politik Islam di Indonesia, sebagian besar berakar pada kenyataan bahwa di dalam Islam batas antara agama dan politik sangatlah tipis. Islam adalah sebagai *Way of Life* dan agama; dan meskipun di Indonesia proses pengislaman merupakan suatu proses setahap demi setahap, namun kandungan politik yang ada di dalamnya sudah terasa sejak awal perkembangannya.

Berkembangnya agama Islam di kepulauan Nusantara berlangsung selama beberapa abad, hal ini merupakan suatu proses yang terus-menerus hingga sekarang belum selesai. Rupanya sudah sejak awal abad ke-13 berdiri suatu kerajaan Islam di pintu gerbang Indonesia utara pulau Sumatera. Lalu menyusul dinasti-dinasti yang memerintah pulau tersebut memeluk agama Islam, di antaranya Aceh yang

memainkan peranan penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka yang merupakan pusat rute perdagangan Asia Tenggara. Dari sini Islam melebarkan sayapnya ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, sehingga sampai permulaan abad ke-17, secara geografis Islam telah menguasai sebagian besar kepulauan Indonesia.

Oleh H.J. Benda dianggap bahwa kemenangan Islam ini luar biasa, sebab pembawa agama Islam ke Indonesia bukanlah para penakluk yang menyebarkan Islam dengan kekerasan seperti di bagian dunia lainnya, melainkan para pedagang muslim dari India yang bersemangat damai. Mereka datang ke Indonesia karena tertarik oleh perdagangan rempah-rempah di Indonesia yang banyak memberikan keuntungan. Dimulai dengan membentuk koloni-koloni dagang Islam di daerah hulu sungai dan kota-kota pesisir kepulauan Indonesia, lalu berkembang menjadi vassal-vasal Islam yang seringkali terkenal karena kekayaan dan semangat dakwahnya yang tinggi. Hal inilah yang kemudian mendorong para aristokrat Indonesia tertarik kepada Islam. Bagi golongan ini, memeluk agama Islam menjadi menarik secara ekonomis dan menguntungkan secara politis. Ini berarti bahwa menganut Islam merupakan senjata bagi mereka untuk menghadapi musuh baik dari luar maupun dari dalam.¹

Dengan demikian, gelombang pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, bukan saja mampu memasuki pola sosial Indonesia, namun lebih dari itu Islam mampu memainkan peranan politik yang penting dan menentukan di Indonesia. Gelombang itu datang terutama dari pusat-pusat Islam yang secara cepat dan potensial menjadi basis anti penjajah. Masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, menghadapi kenyataan bahwa Islam telah menjadi kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Meskipun masuknya Islam tidak dengan sendirinya

Mempersatukan perlawanan orang Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat, kebanyakan perlawanan yang dijumpai menggumpal sekitar umat Islam. Dalam sejarah penjajahan di Indonesia, ideologi Islam memang merupakan kekuatan sosial yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Baik perang besar seperti Perang Paderi dan Perang Aceh, maupun pemberontakan pemberontakan petani seperti peristiwa Cilegon dan Cimareme, kesemuanya dipimpin oleh pemuka Islam dan dijiwai oleh ideologi Islam.

Walaupun orang Islam Indonesia kepercayaannya masih banyak bercampur dengan kepercayaan Animisme, Hindu dan Budha, mereka tetap menganggap bahwa agamanya merupakan alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain. Dalam kenyataannya memang Islam di Indonesia berfungsi sebagai titik pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap pemerintah Kristen dan asing. Maka dari itu tidak mengherankan apabila seorang Belanda yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Dr. Dowes Dekker pernah berkata: "Kalau tidak

¹ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Terj. Daniel Dhakidae.
Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 32

ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari bumi Indonesia.”²

PEMBAHASAN

Reaksi Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia

Sampai akhir abad ke-19 Belanda telah kaya dengan pengalaman pahit dalam menghadapi kekuatan Islam di Indonesia. Sejak kedatangannya pada akhir abad ke-16 di Indonesia, Belanda senantiasa menghadapi kenyataan bahwa Islam selalu menjadi penghalang cita-citanya. Hal ini tidak mengherankan, sebab sebagian besar penduduk daerah yang dijajahnya di kepulauan Indonesia ini beragama Islam, motif aneka perlawanan terhadapnya, bagaimana pun jarang terlepas dari kaitan ajaran agama ini. Sejarah telah membuktikan selama abad ke-19 saja, Kolonial Belanda cukup sibuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang kebanyakan dilancarkan sebagai “perang sabil” atas nama Islam. Tercatat pemberontakan-pemberontakan yang terkenal pada abad ini antara lain, Perang Paderi (1821-1837) di Sumatera Barat, Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah dan yang terlama adalah Perang Aceh dari tahun 1871-1912.

Pemberontakan-pemberontakan tersebut cukup membahayakan dan sempat mengancam kelangsungan hidup penjajahan Belanda di Indonesia, di samping tidak kecil kerugian-kerugian yang diderita Belanda karenanya. Maka dari itu wajarlah apabila Belanda yang menginginkan kelestarian penjajahannya berusaha sekuat tenaga menjinakkan dan sekaligus melumpuhkan Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat membahayakan penjajahannya di negara tersebut.

Sejalan dengan usahanya untuk menguasai medan jajahan itulah, Islam dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya pendidikan “Indologie” untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk pribumi Indonesia. Melalui usaha tersebut diharapkan bisa dihasilkan pegawai-pegawai yang cakap dalam mengurus dan mengendalikan administrasi pemerintah jajahannya di Indonesia. Kebijakan Kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam ini, sering disebut dengan istilah “Islam Politiek”, yakni kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia. Untuk ini Christian Snouck Hurgronje dipandang sebagai peletak dasarnya.

Sebelum kedatangan Snouck di Indonesia, kebijaksanaan-kebijaksanaan Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia tidaklah memiliki arah yang jelas. Hal ini disebabkan miskinnya pengetahuan Kolonial Belanda tentang Islam dan Indonesia, atau mungkin “buta” sama sekali. Pada masa itu kebijaksanaan Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia, secara tradisional dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan dan pengharapan yang berlebihan.

Di satu pihak pemerintah Kolonial Belanda sangat takut terhadap muslim fanatik yang mempunyai hubungan dengan dunia internasional, termasuk bahaya permintaan bantuan kepada negara Islam di luar negeri. Regim Belanda di Indonesia sangat takut terhadap sesuatu yang berbau Pan Islamisme. Islam dibayangkannya

² A. Adaby Darban, “Snouck Hurgronje: Antara Ilmuwan dan Arsitek Pelumpuh Islam”, dalam *Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: tp. tt.), hal. 47

sebagai sebuah agama yang diorganisir secara rapi; di dalam banyak hal dianggap serupa dengan agama Katholik Roma yang memiliki susunan kebiaraan hirarchis yang bersekutu dengan Sultan Turki. Akibatnya, Islam di mata penjajah Belanda nampak sebagai musuh yang menakutkan, maka tidak mengherankan apabila pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu bertindak sangat membatasi ruang gerak umat Islam di Indonesia; terutama dalam hal pergi haji ke Makkah yang dianggapnya sebagai biang keladi yang menimbulkan agitasi dan pemberontakan di Indonesia.³

Di lain pihak, Kolonial Belanda terlalu besar harapannya untuk menghilangkan pengaruh Islam secara cepat melalui proses Kristenisasi, sebab dalam anggapannya agama Kristen lebih unggul dari agama Islam; di samping banyaknya orang Islam Indonesia yang bersifat sinkretis, dianggapnya akan mudah untuk di-Kristen-kan, maka pemerintah Kolonial Belanda pun berupaya untuk menyukkseskan kerja para Missionaris Kristen di Indonesia dengan jalan memberi subsidi dan kemudahan-kemudahan beroperasi. Karena seperti diketahui, pemerintah Belanda pada waktu itu sedang berada dalam tekanan partai-partai agama di parlemen. Mereka menuntut supaya Hindia Belanda dibuka untuk kegiatan missi baik Roma Katholik maupun Protestan untuk sama-sama beroperasi di Indonesia.⁴ Pemikiran politik Islam Snouck Hurgronje Menggoyahkan Sendi-sendi Penjajahan Belanda di Indonesia (analisa sejarah), Mengamati perjalanan sejarah politik Kolonial Belanda terhadap Islam yang telah digariskan oleh peletak dasarnya Snouck Hurgronje, setidaknya ada dua hal yang

Seperti diketahui, Kolonial Belanda mempunyai cita-cita yang memiliki jangkauan jauh ke depan. Lewat politiknya yang digariskan oleh Snouck Hurgronje, Kolonial Belanda berharap akan dapat menenyapkan pengaruh Islam dari bumi Indonesia demi kejayaan dan kelanggengan penjajahannya atas Indonesia. Akan tetapi harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Ternyata politiknya terhadap Islam melahirkan kenyataan-kenyataan pahit baginya. Bukannya menghasilkan landasan yang kokoh buat melahirkan penjajahannya, melainkan berakibat buruk “senjata makan tuan”, sebab hasilnya justru menggoyahkan sendi-sendi penjajahannya sendiri di Indonesia, sehingga baru dua dasawarsa berjalan segera dihentikan, karena dianggap tidak relevan.

Snouck terlalu meremehkan kemampuan Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kepada kemajuan. Politik pecah-belahnya terhadap Islam sebagai ajaran yang dijadikan sebagai landasan dan pangkal tolak bagi politik Kolonial Belanda secara keseluruhan adalah “dangkal” walaupun kelihatannya masuk akal. Islam sebagai agama yang lengkap dan universal tidak mudah untuk dapat dipecah-belah. Pemisahan antara agama dan politik dalam Islam yang dilakukan Snouck dapat dikatakan tidak realistis, sebab ternyata keberhasilannya hanyalah terbatas pada saat Islam sedang dalam kemundurannya.

³ Ibid., hal. 39

⁴ A. Jainuri, *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Keduapuluh*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981, hal. 19

Seperti terbukti kemudian, politik pecah-belahnya baik terhadap Islam sebagai ajaran maupun terhadap umatnya, walaupun dalam batas tertentu memperlihatkan hasilnya; seperti munculnya sekelompok orang Islam Indonesia yang menjadi “split personality” atau generasi baru Islam hasil didikan Barat yang terpecah kepribadian Islamnya adalah buah dari politik pecah-belah atau Splitsings Theorie terhadap Islam sebagai ajaran yang lengkap dan utuh. Terkotak-kotaknya umat Islam Indonesia kepada Islam abangan, santri dan priyayi; juga kepada modernis dan tradisionalis, merupakan hasil dari politik pecah-belah terhadap umat Islam. Akan tetapi semuanya itu tidak dapat menghambat tumbuhnya kesadaran nasional Indonesia yang kemudian menjadi boomerang bagi Kolonial Belanda. Tumbuhnya kesadaran tersebut sebagai akibat dari politik westernisasi dan munculnya renesans Islam di Indonesia karena mendapat rangsangan dan pengaruh dari kebangkitan Islam di luar negeri, khususnya Timur Tengah.

Kebangkitan Islam di Indonesia ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi Islam pada awal abad ke-20, seperti antara lain: Syarekat Dagang Islam (SDI) yang berdiri tahun 1905, Muhammadiyah tahun 1912, Al-Irsyad tahun 1914, Persatuan Islam (PERSIS) tahun 1917, Nahdlotul Ulama (NU) tahun 1926 dan lainnya.⁵ Organisasi-organisasi tersebut telah berupaya secara aktif menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan umat Islam Indonesia dalam rangka mengusir penjajah. Dengan demikian kebangkitan tersebut telah membawa dampak positif bagi perjuangan kaum muslimin di Indonesia; sebaliknya berakibat negatif bagi kepentingan-kepentingan Kolonial Belanda.

Seperti diketahui, sebagian besar dari organisasi Islam tersebut merupakan gerakan reformis Islam yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membendung gelombang westernisasi dan Kristenisasi yang dilakukan oleh Kolonial Belanda terhadap umat Islam di Indonesia, dengan jalan menolak penyerahan bulat-bulat kepada nilai-nilai dan norma-norma Barat; baik yang Kristen maupun yang sekuler. Juga atas usaha merekalah Islam mulai diajarkan secara utuh untuk diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan termasuk politik, sesuai dengan tuntutan jaman. Akibatnya cita-cita Kolonial Belanda untuk melenyapkan pengaruh Islam di Indonesia menjadi sia-sia.

Demikian juga nasib politik westernisasinya yang diarahkan menuju tercapainya cita-cita asosiasi kebudayaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan pengajaran Barat, walaupun telah menghasilkan cukup banyak kader-kader Kolonial Belanda berupa para intelegensia sekuler yang walaupun beragama Islam tetapi hatinya jauh dari Islam, bahkan terkadang telah berani mencela Islam; akan tetapi sayang, akibat kurang keseriusan dari Kolonial Belanda sendiri untuk membina mereka lebih lanjut, akhirnya menjadi “senjata makan tuan”. Sebab pada akhirnya kaum intelegensia hasil didikan Barat tersebut menjadi lawan-lawan lantang yang menentang “status quo” kolonial dan menjadi juru bicara nasionalisme Indonesia yang anti Barat. Mereka menuntut tanggung jawab politik dan keikutsertaan dalam mengambil keputusan mengenai masa depan Indonesia bersama-sama intelek muslim alumni pesantren dan lulusan Timur Tengah yang telah bangkit kesadaran

⁵ A. Mukti Ali, *Alam Fikiran Islam Moderen di Indonesia*. Yogyakarta:

politik. Oleh karena merasa senasib sebagai bangsa yang dijajah, maka mereka bekerja sama bahumembahu menentang penjajahan Belanda atas Indonesia, tanah airnya. Dengan demikian, politik westernisasi Kolonial Belanda melalui pendidikan dan pengajaran Barat dapat dikatakan menemui kegagalan, sebab walaupun ramalan Snouck tentang daya tarik pendidikan Barat terbukti benar, akan tetapi harapan-harapannya bagi asosiasi kebudayaan, untuk sebagian besar mengecewakan.⁶

Akhirnya, mengenai politik keras dan tegasnya terhadap gerakan dan doktrin politik Islam pun dapat dikatakan tidak mengenai sasaran. Meskipun betul, dengan adanya tindakan keras dan tegas terhadap munculnya gerakan dan doktrin politik Islam telah dapat menciptakan suasana tenang dan aman bagi jalannya pemerintah Kolonial Belanda khususnya di Pulau Jawa; akan tetapi hal ini hanya sementara sifatnya. Fenomena sementara itu tercipta hanya saat Islam dalam keadaan lemah atau sedang dalam kemerosotannya. Apabila saat kesadarannya datang, fenomena yang sementara sifatnya itu akan hilang segera. Dalam hal ini Kolonial Belanda ternyata tidak mampu membendung berkembangnya kesadaran di kalangan umat Islam Indonesia, baik akibat mendapat rangsangan dari luar maupun akibat pengumpulan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh umat Islam Indonesia itu sendiri.

Dapat dikatakan, Kolonial Belanda “kecele” (kecewa) dalam menilai gerakan Islam yang tidak bergerak di bidang politik semacam Muhammadiyah umpamanya. Sikap kolonial yang lunak terhadap Muhammadiyah dan beberapa organisasi non politik lainnya yang dianggap tidak berbahaya bagi kolonial adalah keliru besar, memang organisasi Muhammadiyah tidak menjalankan politik praktis yang dapat mengancam keamanan, akan tetapi hampir semua aktivitasnya dapat mendorong ke arah tumbuhnya kesadaran berpolitik umat Islam Indonesia. Padahal dengan tumbuhnya kesadaran di kalangan umat Islam, berarti ancaman bagi eksistensi penjajahan Belanda di Indonesia.

Sebagian besar para haji memang tidak terkena pengaruh fanatik di Makkah. Akan tetapi bagaimana pun kebebasan melaksanakan ibadah haji berarti membuka jalan kepada umat Islam Indonesia untuk menerima pengaruh luar. Pengaruh luar itulah yang kemudian menjadi penggerak tumbuhnya kesadaran dan kebangkitan di kalangan umat Islam Indonesia yang akhirnya mengancam sendi-sendi penjajahan Belanda itu sendiri; sebab adalah tidak mungkin aparat-aparat pemerintah kolonial akan mampu mengawasi secara keseluruhan gerak-gerik jama’ah haji Indonesia di Makkah untuk terhindar dari pengaruh luar, bagaimana pun ketat dan telitinya pengawasan terhadap mereka. Dengan demikian, berarti usaha untuk memberlakukan tindakan keras dan tegas terhadap munculnya gerakan dan doktrin politik Islam menjadi tidak lagi efektif dan berdaya-guna dalam membendung arus kebangkitan Islam pada awal abad ke-20 yang notabene akibat pengaruh dari Timur Tengah.

⁶ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 60

Dari uraian-uraian di atas apabila kita analisa, ada beberapa faktor yang menyebabkan politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia melahirkan kenyataan-kenyataan yang berbeda dari harapan-harapannya semula, yakni:

Pertama: Pendekatan empiris yang dilakukan Snouck terhadap Islam tidak lengkap dan menyeluruh. Penelitiannya terhadap Islam hanya terbatas pada unsur-unsur Islam yang lahir pada masa Islam sedang dalam kemunduran dan kenyataan-kenyataan yang berkembang di kalangan umat Islam yang terbelakang. Hal inilah yang menimbulkan dangkalnya penilaian Snouck atas kemampuan Islam. Lebih-lebih lingkungan dan jamannya yang angkuh mendorong pula bagi sikapnya untuk meremehkan kemampuan Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kepada kemajuan. Snouck memang tidak pernah menyelidiki “jaman keemasan Islam” ataupun “jaman renesans Islam” yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qoyim alJauziyah pada abad 8 H (14 M) yang dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pembaharu lainnya. Andaikata Snouck menyelidikinya maka besar kemungkinan penilaiannya terhadap Islam akan lain.

Kedua: Kolonial Belanda tidak menjalankan politik yang sudah digariskan oleh Snouck secara sungguh-sungguh. Memang tidak sedikit unsur-unsur pemerintah kolonial yang tidak sepakat dengan gagasan Snouck; terbukti dalam usaha merealisasikan cita-cita asosiasinya dia dapat dikatakan berjalan sendirian. Sebagaimana dikatakan Bousquet bahwa “pemerintah Kolonial Belanda tidak mau mempertimbangkan nasehat Snouck tentang penanaman perasaan asosiasi sebagai bagian dari politiknya terhadap Islam”. Dia menyebarkan biaya pada sekolah-sekolah pemerintah yang terlalu tinggi sehingga anak-anak pribumi amat sedikit yang dapat memasukinya, sehingga peranannya diambil alih oleh lembaga-lembaga pendidikan pribumi. Padahal pendidikan dan pengajaran merupakan faktor penting bagi keberhasilan cita-cita asosiasi. Akibatnya sudah dapat diduga, suatu usaha yang dilakukan separoh hari akan menemui kegagalan.

Demikianlah nasib yang menimpa politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia; antara harapan dan kenyataan yang jauh berbeda. Memang harapan-harapan Kolonial Belanda terhadap politiknya dapat dikatakan terlampaui berlebihan dibanding kerja yang telah diusahakannya. Sebagaimana pencetusnya yang juga merupakan seorang pemikir idealis menurut H.J. Benda, dia itu seorang idealis yang tidak sabaran. Seperti pembaharu-pembaharu politik kolonial sejamannya yang tidak sabar ingin cepat mewujudkan cita-cita “asosiasi” dan “Indonesianisasi”, sehingga semangat tidak sabaran itu mendapat perlawanan gigih dari para Administrator Kolonial Belanda yang konservatif yang tidak rela membagi kekuasaannya demi suksesnya “Indonesianisasi”. Pendidikan Barat hanyalah langkah awal bagi terwujudnya cita-cita Kolonial Belanda yang ideal itu, dia harus disusul oleh pemberian bagian dalam masalah-masalah politik dan administratif tanah jajahan kepada para ahli waris Indonesia yang berpendidikan Barat. Kalau tidak, akibatnya akan menjauhkan citacita dari jangkauan, bahkan menjadi senjata makan tuan. Ternyata demikian adanya.

Kondisi Umat Islam Dalam Masa Kolonial Belanda

A. Kondisi Sosial Politik Umat Islam Indonesia

Penyebaran Islam di Indonesia dimulai dari utara Sumatra, terutama melalui aktivitas perdagangan. Islam menyebar ke daerah penghasil rempah-rempah dan pusat perdagangan internasional seperti Selat Malaka, pesisir utara Jawa, Maluku, dan Brunei. Pada abad ke-13, berdiri kerajaan Islam pertama di Sumatra Utara, diikuti Kesultanan Aceh pada akhir abad ke-14, yang memainkan peran penting dalam sejarah politik Islam di Nusantara.⁷

Pada abad ke-15, Islam semakin kokoh di Malaka, pusat perdagangan Asia Tenggara. Kesultanan Kesultanan Islam seperti Aceh dan Demak memperluas pengaruhnya, tidak hanya secara agama tetapi juga politik dan perdagangan. Para pedagang dan masyarakat perkotaan dari berbagai lapisan menjadi pemeluk Islam awal, yang kemudian meluas ke wilayah-wilayah pedalaman.

Transformasi politik terjadi ketika raja-raja Hindu memeluk Islam, yang menciptakan kesultanan sebagai bentuk pemerintahan baru. Konversi ini sering didorong motif politik, misalnya untuk mengukuhkan legitimasi di hadapan rakyat yang mayoritas Islam atau untuk menandingi kekuatan kerajaan Islam lainnya. Contohnya, Kesultanan Mataram memilih menjadi Islam untuk memperkuat kekuasaannya melawan pengaruh Kesultanan Banten dan menghadapi ancaman kolonial VOC.

Di Jawa Barat, Islamisasi juga berlangsung melalui pernikahan politik, seperti Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran yang menikahi Nyai Subang Larang, seorang santri dari Syekh Hasanudin (Syekh Qura). Dari keturunan ini lahir Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songo, yang berperan besar dalam menyebarkan Islam.⁸

a) Peran Kesultanan Aceh dan Demak

Kesultanan Aceh menjadi kekuatan dominan di Sumatra pada abad ke-16, terutama setelah runtuhnya Malaka akibat penjajahan Portugis⁹. Aceh memperluas wilayahnya hingga Barus dan Indrapura, serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Turki, Persia, dan Perancis. Pada masa Sultan Ali Muqhayat Syah dan Sultan Alauddin Mansur Syah, Aceh menjadi pusat politik dan perdagangan Islam yang kuat di Asia Tenggara. Kesultanan Demak di Jawa, yang didirikan oleh Raden Patah, berkembang pesat pada abad ke-15 dan 16. Demak menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, termasuk sebagian besar wilayah Majapahit yang telah melemah. Namun, hubungannya dengan Malaka terganggu setelah wilayah itu jatuh ke tangan Portugis. Demak bersama Aceh berusaha merebut kembali Malaka, tetapi gagal.

b) Perlawanan terhadap Kolonialisme

Mulai abad ke-16, umat Islam menghadapi ancaman dari penjajahan Barat. Portugis dan Spanyol berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dan merusak hubungan dagang Islam. Kesultanan seperti Demak, Aceh, Ternate, dan Banten melancarkan perlawanan bersenjata terhadap kolonial Katolik tersebut.

⁷ Hadi, *Aceh :Sejarah, Budaya,Dan Tradisi*,¹²

⁸ Suryanegara,*Api Sejarah*,¹⁴⁸.

⁹ Ibid, 162

Pada abad ke-17, muncul ancaman baru dari Belanda (VOC) dan Inggris, yang menggunakan monopoli perdagangan sebagai alat dominasi. Beberapa kesultanan Islam, seperti Mataram, Banten, dan Makassar, menentang penetrasi VOC. Konflik dengan VOC sering berujung pada perang besar, seperti perlawanan Sultan Agung dari Mataram dan Sultan Hasanuddin dari Makassar.

Signifikansi Sosial dan Politik Islam, Menurut Harry J. Benda, Islam memainkan peran ideologis dan politik yang signifikan di Nusantara. Konversi agama oleh raja-raja tidak hanya mengakui Islam sebagai arus bawah yang kuat di masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk melawan kolonialisme Barat. Umat Islam, baik dari kalangan pedagang, ulama, maupun sultan, bersatu dalam menghadapi ancaman imperialis.¹⁰

Kesultanan Islam juga menjalin hubungan luar negeri yang strategis. Kesultanan Aceh, misalnya, bersekutu dengan Turki Utsmani, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk melawan dominasi kolonial. Hubungan diplomatik ini memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan politik yang

berpengaruh di Asia Tenggara. Sejak penyebaran awalnya, Islam di Indonesia tidak hanya menjadi agama tetapi juga kekuatan sosial dan politik yang penting. Kesultanan Islam berperan dalam memperluas pengaruh agama, menghadapi penjajahan Barat, dan menciptakan identitas politik yang kokoh di Nusantara. Perlawanan terhadap kolonialisme dan monopoli perdagangan VOC menunjukkan peran sentral Islam dalam sejarah perjuangan Indonesia.

B. Kondisi Sosial Umat Islam Indonesia

Pada masa kerajaan Islam di Nusantara, umat Islam memainkan peran sentral dalam dinamika sosial dan ekonomi. Pusat-pusat kekuasaan kerajaan Islam yang berorientasi maritim, seperti Malaka, Aceh, Banten, Demak, dan Gowa-Makassar, menjadi titik penggerak utama aktivitas ekonomi. Lokasi strategis di jalur perdagangan internasional memungkinkan kerajaan-kerajaan ini berkembang pesat sebagai penghubung antara pedagang dari Timur Tengah, India, Cina, hingga Eropa.

Karakteristik Ekonomi Kerajaan Islam

Ekonomi Maritim, Sebagian besar kerajaan Islam di Nusantara mengandalkan pelabuhan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya menjadi tempat perdagangan tetapi juga sebagai pusat perpajakan dan administrasi ekonomi. Sultan atau penguasa setempat mengelola pelabuhan melalui pejabat seperti syahbandar, yang mengatur lalu lintas kapal, memungut pajak, dan mengawasi keamanan perdagangan.

Pendapatan Sultan dan Kerajaan, Kerajaan memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, termasuk bea cukai barang impor, pajak perdagangan, dan keuntungan dari usaha dagang Sultan sendiri. Contohnya di Malaka, Sultan memiliki kapal-kapal dagang pribadi dan mendapat prioritas dalam distribusi ruang kargo di kapal dagang lainnya. Keuntungan yang besar membuat kerajaan-kerajaan ini mampu mengumpulkan kekayaan luar biasa. Sultan Alauddin Syah dari Malaka, misalnya,

¹⁰ Benda, *Bulan sabit dan Matahari*. 31

dikabarkan memiliki kekayaan setara dengan 140 kuintal emas, yang disertai dengan berbagai permata berharga.

Keberagaman Pasar, Pasar di kota-kota besar seperti Aceh, Banten, dan Malaka menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai bangsa: Arab, Persia, Cina, India, hingga Eropa. Pasar-pasar ini tidak hanya menjual barang impor tetapi juga hasil produksi lokal, seperti rempah-rempah, beras, kayu, dan hasil bumi lainnya. Selain itu, terdapat pasar-pasar lokal di desa-desa yang berfungsi sebagai tempat barter hasil pertanian dengan kebutuhan sehari-hari.

- 1) Pasar Karangantu (Banten): Pusat perdagangan internasional dengan pedagang dari berbagai bangsa.
- 2) Pasar di Aceh: Memiliki tiga pasar besar yang melayani berbagai jenis perdagangan, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang mewah seperti telur penyu.¹¹

Sistem Pembayaran, Pada awalnya, transaksi ekonomi banyak dilakukan dengan sistem barter, terutama antara pedagang pesisir dan pedagang pedalaman. Namun, pada abad ke-15 dan 16, penggunaan mata uang mulai meluas, baik mata uang lokal maupun asing seperti koin dari Arab, Cina, dan India. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan sistem ekonomi dan integrasi Nusantara dalam jaringan perdagangan global.¹²

Kedatangan Bangsa Eropa, Kedatangan Portugis pada abad ke-16 membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi tradisional. Mereka berusaha menguasai pelabuhan strategis seperti Malaka untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Hal ini memicu konflik dengan kerajaankelajaan Islam, seperti Kesultanan Demak dan Aceh, yang berupaya merebut kembali kendali atas perdagangan.

Portugis tidak sendirian. Inggris dan Belanda menyusul dengan membawa organisasi dagang seperti EIC (Inggris) dan VOC (Belanda). Kehadiran VOC menjadi tantangan terbesar bagi umat Islam, karena mereka tidak hanya memonopoli perdagangan tetapi juga menciptakan kebijakan yang melemahkan penguasaan ekonomi umat Islam.

VOC menggunakan propaganda untuk mengalihkan perhatian umat Islam dari aktivitas ekonomi ke urusan religius. Mereka menyebarkan hadits-hadits palsu yang menekankan pentingnya ibadah di masjid dibandingkan dengan aktivitas di pasar. Akibatnya, umat Islam mulai kehilangan kontrol atas pasar, yang kemudian dikuasai oleh pedagang dari Cina, India, dan Arab.

Dampak Sosial dan Ekonomi Penjajahan, Diskriminasi Rasial, VOC memberlakukan kebijakan diskriminatif yang meminggirkan pedagang pribumi Islam. Pribumi diposisikan sebagai warga kelas tiga, sementara pedagang Cina, India, dan Arab mendapat posisi lebih baik sebagai warga kelas dua. Akibatnya, umat Islam kehilangan akses terhadap pasar dan sumber ekonomi lainnya.¹³

¹¹ avis, John; Mundi, Peter, *catatan perjalanan ke Aceh*.

¹² Abdullah, et.al, *Sejarah Umat Islam Indonesia III*, 304

¹³ Suryanegara, *Api Sejarah*, 148.

Kehilangan Budaya Niaga, Propaganda dan tekanan ekonomi menyebabkan umat Islam kehilangan semangat kewirausahaan. Hal ini berakibat pada kemunduran ekonomi umat Islam dan hilangnya dominasi mereka di pasar-pasar strategis.

Perlawanan Ekonomi dan Politik, Kehadiran VOC memicu perlawanan dari pedagang pribumi dan kerajaan-kerajaan Islam. Konflik ini tidak hanya dalam bentuk militer, seperti perang melawan Portugis dan VOC, tetapi juga dalam bentuk solidaritas ekonomi, di mana umat Islam berusaha mempertahankan kontrol atas pasar lokal.

Monopoli VOC, VOC memaksakan sistem monopoli yang bertentangan dengan kebiasaan perdagangan tradisional. Sistem ini menciptakan ketidakadilan dan ketegangan sosial yang mendorong umat Islam untuk memperkuat persatuan melawan kolonialisme. Kondisi sosial ekonomi umat Islam di Nusantara pada masa kerajaan Islam mencerminkan kejayaan perdagangan maritim yang didukung oleh pelabuhan-pelabuhan strategis dan pasar yang aktif. Namun, kedatangan bangsa Eropa, terutama VOC, membawa tantangan besar yang melemahkan ekonomi umat Islam. Diskriminasi, monopoli, dan propaganda kolonial menyebabkan umat Islam kehilangan dominasinya di sektor ekonomi. Meskipun demikian, perlawanan yang terus dilakukan mencerminkan semangat perjuangan umat Islam untuk mempertahankan identitas dan kemandirian ekonominya.

C. Kondisi Pendidikan Umat Islam di Indonesia

Pendidikan umat Islam di Indonesia memiliki hubungan erat dengan perkembangan politik dan sosial yang terjadi di dunia Islam, terutama yang terjadi di luar wilayah Nusantara. Kekuasaan politik Islam yang berkembang di Timur Tengah, Asia Selatan, serta wilayah lainnya memberi dampak besar terhadap kebangkitan Islam di Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong penyebaran dan penguatan ajaran Islam di Nusantara adalah pengaruh dari dinasti-dinasti besar yang ada di luar Indonesia, seperti Dinasti Genghis Khan dan Kesultanan Ottoman. Melalui pengaruh ini, kekuasaan Islam mulai meluas ke berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia, dan dengan itu perkembangan agama Islam semakin mendalam.

Islam mulai berkembang pesat, didukung dengan pendirian berbagai lembaga pendidikan, seperti pesantren yang memainkan peran penting dalam pengajaran agama dan budaya. Pada masa tersebut, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai tempat untuk mempersiapkan para pemimpin bangsa. Salah satu contoh konkret adalah bagaimana para putra sultan dari Kesultanan Ternate, Tidore, dan Maluku dikirim untuk menuntut ilmu ke pesantren-pesantren besar yang ada di Jawa, seperti yang dipimpin oleh Wali Songo, khususnya Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Pesantren menjadi tempat berkumpulnya santri dari berbagai suku dan etnis, yang kemudian menyatukan mereka dalam satu visi agama yang mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai dasar dari nasionalisme Indonesia.¹²¹⁵

¹⁴ Poesponegoro et.al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, 193.

Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Abad Ke-19

Namun, meskipun pesantren telah ada jauh sebelum abad ke-19, menurut survei pertama yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1819, lembaga pendidikan Islam masih sangat terbatas dan belum merata. Pesantren baru mulai berkembang di daerah-daerah tertentu, seperti di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, sementara di wilayah lainnya, pendidikan agama Islam lebih bersifat informal, yang diajarkan di rumah-rumah pribadi atau masjid. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam telah menyebar luas di Nusantara, namun infrastruktur pendidikan Islam pada waktu itu masih sangat terbatas.

Pesantren Tegalsari yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur, menjadi salah satu pesantren tertua yang tercatat didirikan pada tahun 1742 oleh Sultan Paku Buwono II. Pendirian pesantren ini bertujuan untuk menghargai Kyai Hasan Besari, seorang ulama besar yang mengajarkan agama Islam di wilayah tersebut. Pesantren ini juga menjadi tempat untuk mempersiapkan para santri yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Walaupun tidak ada bukti yang jelas mengenai pesantren yang lebih tua, dapat dipastikan bahwa pendidikan Islam informal yang diberikan oleh ulama atau guru agama sudah ada sebelumnya di berbagai daerah.

Selain itu, sejak pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, banyak umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke Makkah. Banyak dari mereka yang memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang Islam yang lebih mendalam, serta membawa pulang ajaran-ajaran ortodoks setelah mereka kembali dari Makkah. Oleh karena itu, pada akhir abad ke-19, ajaran Islam ortodoks semakin populer dan diperkenalkan melalui pesantren-pesantren yang berkembang. Pengaruh pendidikan di Makkah sangat besar, dan banyak ulama yang terlatih di Makkah mendirikan pesantren dengan kurikulum yang lebih ketat dalam mengajarkan ajaran Islam yang lebih konservatif.¹³

Pesantren Sebagai Pusat Pendidikan Dan Sentimen Anti-Kolonial

Seiring berjalannya waktu, pesantren mulai berperan lebih besar dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang semakin kuat. Selama periode penjajahan, para ulama dan pesantren memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai agama Islam. Ketika penjajahan Barat, khususnya Belanda, berusaha menghapuskan ajaran Islam dengan menggantinya dengan agama Kristen melalui kolonialisasi, pesantren menjadi benteng utama untuk melawan upaya tersebut. Ulama mengajarkan kepada santri dan masyarakat bahwa mempertahankan agama dan tanah air adalah bagian dari kewajiban Islam yang tidak bisa ditawar.

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pergerakan anti-kolonial. Pesantren menjadi tempat yang mengajarkan para santri untuk melawan ketidakadilan dan penindasan

¹⁵ Benda, *Bulan sabit dan Matahari*. 31

¹⁶ Suryanegara, *Api Sejarah*, 148.

yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui perang bersenjata yang dipimpin oleh para ulama dan sultan. Salah satu perang besar yang dipimpin oleh umat Islam adalah Perang Banten di abad ke-18, yang melibatkan pasukan Muslim yang melawan penjajah Belanda. Selain itu, pada abad ke-19, terjadi Perang Cirebon (1802-1806) yang dipimpin oleh ulama dan para penguasa setempat melawan Belanda di bawah panji Islam. Di Sumatra, Perang Padri (1821-1838) melibatkan ulama yang berperang melawan Belanda.

Beberapa perang besar lainnya yang melibatkan umat Islam di Indonesia adalah Perang Makassar (1660-1669), Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Aceh (1873-1912). Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dipimpin oleh umat Islam melawan penjajahan Belanda. Perang ini berlangsung selama hampir 40 tahun, dengan umat Islam Aceh mempertahankan diri dengan sangat gigih meskipun menghadapi senjata yang jauh lebih modern dari Belanda. Pada masa ini, perlawanan umat Islam yang dipimpin oleh ulama dan sultan menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme.¹⁷

Pengaruh Pendidikan Islam Dalam Membangun Nasionalisme

Pendidikan yang diajarkan di pesantren memainkan peran sangat besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan umat Islam. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa perjuangan untuk kemerdekaan adalah bagian dari ajaran Islam.

Ulama sebagai tokoh agama memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat perlawanan di kalangan umat Islam. Mereka menyebarkan ideologi bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan untuk menghindarkan bangsa Indonesia dari penindasan kolonial.

Selain itu, pendidikan yang diberikan di pesantren juga mendidik para santri untuk tidak hanya berfokus pada kehidupan spiritual semata, tetapi juga memperjuangkan kemajuan bangsa. Pendidikan yang mengutamakan ajaran Islam yang toleran dan inklusif turut memperkuat semangat kebangsaan yang mengedepankan persatuan dalam keragaman. Oleh karena itu, pesantren menjadi tempat di mana nilai-nilai nasionalisme berkembang, dan Islam dijadikan dasar dari semangat perjuangan untuk kemerdekaan.

Perubahan Arah Pendidikan Islam Di Indonesia Di Awal Abad Ke-20

Pada awal abad ke-20, ulama mulai menyadari bahwa perjuangan melalui cara-cara tradisional seperti peperangan atau pemberontakan tidak akan menghasilkan perubahan yang permanen. Oleh karena itu, mereka mulai mengadopsi pendekatan baru yang lebih terorganisir melalui pembentukan berbagai organisasi yang fokus pada bidang pendidikan, sosial, dan pergerakan politik. Organisasi-organisasi ini, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada awal abad ke-20, menjadi wadah bagi umat Islam Indonesia untuk bergerak secara terstruktur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa.

Gerakan-gerakan nasionalis yang melibatkan kaum sekuler, komunis, dan reformis Islam mulai bermunculan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para

pemimpin dan intelektual Muslim berjuang untuk merumuskan masa depan Indonesia yang bebas dari penjajahan. Para ulama dan intelektual Muslim memperkenalkan ide-ide baru yang lebih modern dan terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Pendidikan umat Islam di Indonesia, yang melalui pesantren, memainkan peran yang sangat besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga tempat melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki semangat perjuangan dan nasionalisme. Dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan perjuangan untuk kemerdekaan, pesantren berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk berperang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Perjuangan ini, yang dipimpin oleh ulama, sultan, dan para santri, telah mengukir sejarah besar dalam perjuangan melawan kolonialisme, dan pesantren tetap menjadi simbol kebangkitan umat Islam dalam membangun bangsa ¹⁴Indonesia.

KESIMPULAN

Peran Islam di Indonesia selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Islam berperan dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan politik komunitas Muslim. Artikel ini menekankan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga kekuatan politik dan ideologis yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia.

Sejak awal kedatangannya, Islam telah menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Kesultanan Islam memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh agama, menghadapi penjajahan Barat, dan menciptakan identitas politik yang kokoh di Nusantara. Contohnya, Kesultanan Aceh menjadi pusat politik dan perdagangan Islam yang kuat di Asia Tenggara pada abad ke-16, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Turki, Persia, dan Perancis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkembang secara internal, tetapi juga berperan aktif dalam jaringan politik internasional.

Peran Islam dalam menghadapi kolonialisme juga sangat penting. Perlawanan terhadap kolonialisme dan monopoli perdagangan VOC menunjukkan peran sentral Islam dalam sejarah perjuangan Indonesia. Perang Aceh (1873-1912), yang dipimpin oleh ulama dan sultan, merupakan contoh nyata bagaimana pesantren dan ulama berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Perang ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjadi kekuatan politik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi rakyat dalam melawan penindasan.

Pesantren, sebagai pusat pengajaran agama dan budaya, juga berperan penting dalam mempersiapkan para pemimpin bangsa dan menjadi pusat pergerakan anti-kolonial. Pesantren mengajarkan para santri untuk melawan ketidakadilan dan penindasan, serta menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan umat Islam. Melalui pesantren, Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang mendorong perjuangan untuk kemerdekaan.

Pada awal abad ke-20, ulama mulai mengadopsi pendekatan baru yang lebih terorganisir melalui pembentukan berbagai organisasi seperti Muhammadiyah dan

¹⁸ Suryanegara, *Api Sejarah*, 148.

Nahdlatul Ulama. Organisasi ini menjadi wadah bagi umat Islam Indonesia untuk bergerak secara terstruktur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menggunakan strategi baru untuk mencapai tujuannya.

Islam telah menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia, baik dalam menghadapi kolonialisme maupun dalam membangun identitas nasional. Perjuangan umat Islam, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perlawanan dan gerakan, telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk sejarah dan masa depan bangsa Indonesia. Artikel ini menggarisbawahi bahwa Islam tidak hanya berperan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, menjadi kekuatan yang mendorong perubahan dan kemajuan di Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

- Abdullah, Taufik, dkk. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.
- Benda, Harry J. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1958.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2000*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Emi Nuraemi, Lina Pusvisasari, Fatma Husna Haibah Nurulloh, & Ingeu Siti Aisyah. (2025). Shifting Local Islamic Cultural Values in the Archipelago. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(1), 29-34. <https://doi.org/10.61166/alwadhiv.viii.5>
- Hasjmy, A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Helmi Muslimah, Inda Upi Nursania Kulsum, Siti Yani Yuliani, & Lina Pusvisasari. (2025). Indonesian Islamic Movement in the Early 20th Century. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(1), 35-44. <https://doi.org/10.61166/alwadhiv.viii.8>
- Mohammad Abdul Al Halib, & Lina Pusvisasari. (2025). Harmony of Islam and Local Traditions in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Era of Modernization. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(1), 20-28. <https://doi.org/10.61166/alwadhiv.viii.4>
- Suminto, A.S. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru I*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1966.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam Bag.3*. Terj. Ghufroon A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Robiatul Samiah, Lina Pusvisasari, Agna Rahmat Maulana, & Sarah Apiani. (2025). Western Imperialism Against the Islamic World. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(1), 12-19. <https://doi.org/10.61166/alwadhiv.viii.2>

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2013.